

BAB 2

KAJIAN TEORETIK

2.1 Kerangka Teori

Penelitian ini berkaitan dengan transformasi konflik, konflik, dan damai. Oleh karena itu beberapa teori dan konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

2.1.1. Transformasi Konflik

Lederach memberikan definisi transformasi konflik adalah untuk menggambarkan dan menanggapi pasang surut konflik sosial sebagai peluang untuk menciptakan proses perubahan konstruktif yang dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial, dan menanggapi masalah kehidupan nyata dalam hubungan manusia.⁹

Transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian konflik yang bertujuan mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil, mengimplikasikan sebuah transformasi mendalam pada pihak-pihak yang bertikai dan dalam hubungan mereka serta dalam situasi yang menciptakan konflik. Istilah transformasi konflik juga digunakan untuk memahami proses perdamaian dimana bermakna sebagai sebuah urutan langkah-langkah transisi yang diperlukan.¹⁰

Transformasi konflik adalah suatu proses untuk melibatkan dan mengubah hubungan, minat, wacana, bahkan konstitusi masyarakat yang mendukung konflik kekerasan yang berkelanjutan. Pihak-pihak yang berkonflik, masyarakat dan wilayah yang terdampak konflik, pihak dari luar yang memiliki sumber daya manusia dan material yang mendukung,

⁹ John Paul Lederach, *The Little Book...*, hlm 9.

¹⁰ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Merubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 31.

memiliki peran yang dapat saling melengkapi untuk berkontribusi dalam proses perdamaian jangka panjang.³

Dari beberapa definisi transformasi konflik yang sudah disebutkan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa transformasi konflik adalah sebuah urutan langkah-langkah transisi untuk menciptakan proses perubahan konstruktif yang dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, masyarakat dan wilayah yang terdampak konflik, dan pihak luar yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan material yang mendukung untuk berkontribusi dalam perdamaian jangka panjang.

Vayrynen seperti yang dikutip oleh Djumala mengatakan bahwa untuk menganalisis bagaimana suatu konflik dapat bertransformasi sehingga tercapainya perdamaian maka terdapat lima aspek yang perlu di analisis,⁴ kemudian hal tersebut dikembangkan oleh Miall.⁵

1. Transformasi konteks

Konflik dilekatkan dalam konteks sosial, regional, dan internasional, yang seringkali bersifat kritis bagi keberlanjutan konflik. Perubahan dalam konteks terkadang dapat mempunyai efek yang lebih dramatis dibandingkan perubahan di dalam pihak-pihak yang bertikai atau di dalam hubungan mereka.

2. Transformasi struktural

Transformasi struktural diperlukan jika akar penyebab konflik terletak dalam struktur hubungan pihak-pihak yang bertikai, dimana terdapat pihak yang lebih dominan atau kuat dan ada pihak yang lemah. Sebagaimana menurut Vayrynen dalam Djumala bahwa konflik terjadi jika

³ Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi Dimensional Task*, (Berghof Research Center For Constructive Conflict Management, 2004), hlm 4, dalam www.berghof-handbook.net di unduh pada tanggal 4 Agustus 2018.

⁴ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 101.

⁵ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik...*, hlm 250-252.

hubungan antara kedua pihak yang bertikai tidak seimbang.⁶ Oleh karena itu transformasi konflik dapat terjadi jika ada perubahan dalam perimbangan kekuatan antara kedua pihak. Transformasi struktural mengacu pada perubahan yang terjadi dalam pola hubungan antara kedua belah pihak yang berkonflik.⁷

3. Transformasi aktor

Transformasi aktor meliputi keputusan atau kebijakan yang dibuat untuk mengubah tujuan ataupun pendekatan umum pihak-pihak yang berkonflik terhadap konflik, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan atau menginisiasi perdamaian.⁸ Miall menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bertikai dapat menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan merubah perspektif secara radikal. Hal tersebut dapat terjadi melalui perubahan kepemimpinan, perubahan dalam konstituensi pemimpin, nilai atau keyakinan.⁹ Transformasi aktor yang terlibat dapat memengaruhi proses perubahan dari konflik menjadi damai.¹⁰

4. Transformasi persoalan

Transformasi persoalan terkait dengan bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mereformulasi posisi dan membingkai ulang permasalahan mereka.¹¹ Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai mengenai berbagai isu. Ketika mereka mengubah posisi, atau ketika persoalan kehilangan sifatnya yang menyolok mata atau persoalan baru muncul, maka konflik berubah. Perubahan posisi sangat berhubungan dengan perubahan kepentingan dan perubahan tujuan, dan karenanya, juga perubahan bagi transformasi aktor, dan juga bagi konteks dan

⁶ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 105.

⁷ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 105.

⁸ Hugh Miall, *Conflict Transformation...*, hlm 10.

⁹ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik...*, hlm 250.

¹⁰ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 108.

¹¹ *Ibid*, hlm 10.

struktur konflik. Membingkai kembali persoalan dapat membuka jalan bagi penyelesaian.

5. Transformasi kelompok dan personal

Transformasi kelompok dan personal merujuk pada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh perorangan, kelompok atau pemerintah terhadap resolusi konflik.¹² Misalnya, seorang pemimpin kelompok yang awalnya bersikap acuh tak acuh terhadap inisiasi perdamaian kemudian berubah menjadi peduli terhadap penyelesaian konflik. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan perspektif dan keinginan karena pada dasarnya konflik terjadi pada hati dan pikiran manusia maka pada pada seseorang lah perubahan dapat terjadi.¹³

Untuk lebih mudah memahami transformasi konflik maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Transformasi Konflik¹⁴

Box 3: Transformers of Conflict	
type	examples
1. context transformations	change in the international or regional environment
2. structure transformations	change from asymmetric to symmetric relations change in power structures changes of markets of violence
3. actor transformations	changes of leadership changes of goals intra-party change change in party's constituencies changing actors
4. issue transformations	transcendence of contested issues constructive compromise changing issues de-linking or re-linking issues
5. personal/elite transformations	changes of perspective changes of heart changes of will gestures of conciliation

¹² Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 112.

¹³ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik...*, hlm 251

¹⁴ Hugh Miall, *Conflict Transformation...*, hlm 10.

Dalam penelitian ini, teori transformasi konflik digunakan untuk menganalisis transformasi konflik yang terjadi di Goa Pindul.

2.1.2. Teori Konflik

Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu *Confligere* yang artinya adalah saling memukul. Konflik selalu berawal dari adanya perbedaan, perbedaan ini kemudian bertransformasi ke dalam sub bagian-bagian kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.¹⁵ Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan yang menganggap bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.¹⁶ Dari perbedaan persepsi mengenai kepentingan tersebut maka dapat digunakan untuk meramal apa yang akan dilakukan seseorang atau kelompok selanjutnya.

Konflik dapat juga diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun, tujuan mereka berkonflik bukan hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga dapat dijadikan untuk menundukkan pesaingnya sehingga konflik juga dapat disebut sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber yang ada di masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya yang ketersediaannya relatif terbatas.¹⁷

Galtung menyebutkan bahwa konflik terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan yaitu *attitude* (sikap), *behaviour* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi). Ketiga komponen tersebut digambarkan di dalam sebuah segitiga yang sering disebut dengan Segitiga Konflik Galtung atau Segitiga ABC Galtung. Sikap mengacu pada pemahaman atau kesalahpahaman terhadap kelompok sendiri ataupun kelompok

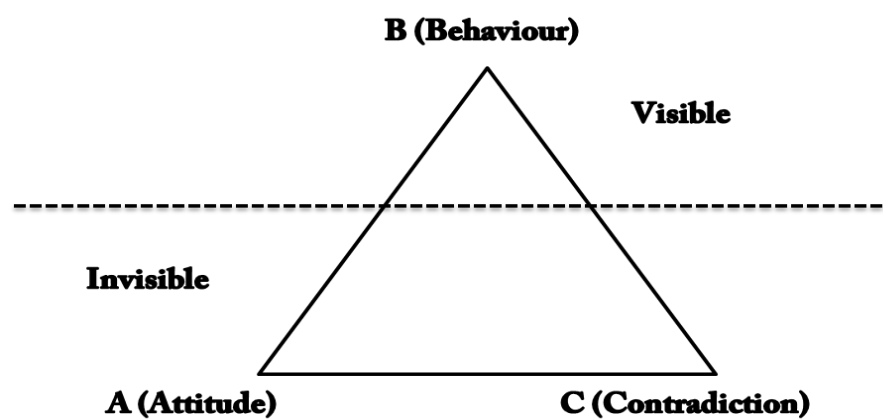
¹⁵ Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 6.

¹⁶ Pruitt dan Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9-10.

¹⁷ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm 53.

lawan. Perilaku mengacu pada bentuk kerjasama dan koersi yang menunjukkan sekumpulan gerakan, baik itu berupa keakraban ataupun permusuhan. Kontradiksi merupakan kondisi mendasar ketika adanya ketidaksesuaian dari tujuan masing-masing pihak.

Menurut Galtung dalam setiap konflik selalu ada kontradiksi, sesuatu yang menghalangi jalan sesuatu yang lain. Dimana ketika saya menginginkan sesuatu yang buruk begitu juga yang diinginkan oleh orang lain. Perselisihan tersebut lebih mudah mengarah pada upaya untuk mencederai atau melukai pihak lawan.¹⁸



Gambar 2.1. Segitiga Konflik Galtung.¹⁹

Galtung mengatakan, konflik adalah konsep triadik $A + B + C$.²⁰ Ketiga hal tersebut akan saling berhubungan, kontradiksi dapat di alami sebagai keadaan frustrasi dimana suatu tujuan dihalangi oleh sikap. Kontradiksi yang berkelanjutan dapat melahirkan perilaku agresif yang jika terus menerus dipicu dapat menimbulkan kekerasan. Dari segitiga konflik tersebut kita dapat mengetahui kekerasan yang terlihat (*visible*) maupun kekerasan yang tidak terlihat (*invisible*). Kekerasan yang terlihat merupakan bentuk dari kekerasan langsung (*direct violence*), sedangkan kekerasan yang tidak terlihat berupa kekerasan budaya (*cultural violence*) dan kekerasan struktural (*struktural violence*).

¹⁸ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: Sage Publications Ltd, 2012), hlm 70.

¹⁹ *Ibid*, hlm 72.

²⁰ *Ibid*, hlm 71.

Dari beberapa definisi konflik yang telah disebutkan di atas maka memberikan gambaran mengenai beberapa jenis konflik, diantaranya adalah konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intragroup, konflik intergroup, konflik intraorganisasi, dan konflik interorganisasi.

Konflik memengaruhi situasi dan mengubah berbagai hal dengan berbagai cara, konflik berdampak pada orang secara pribadi, relasional, struktural, dan budaya. Dimensi personal, relasional, struktural, dan budaya menjadi empat kategori besar perubahan setelah terjadinya konflik.²¹ Dalam sebuah konflik terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Permasalahan tradisional yang menjadi penyebab utama timbulnya konflik bukan lagi permasalahan mengenai perebutan wilayah, sumber ekonomi, ataupun Barat versus Timur melainkan bagaimana perjuangan sekelompok masyarakat (identitas komunal) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan terhadap identitas, akses yang adil dalam institusi dan partisipasi ekonomi.²²

Adapun menurut Ichsan Malik, sumber-sumber konflik sosial di Indonesia ada 5, yaitu:²³

1. Konflik Struktural. Adanya ketimpangan dalam mengakses dan melakukan kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan, dan sebagainya) dimana pihak yang memiliki kewenangan resmi menetapkan kebijakan yang berpeluang untuk menguasai dan mengontrol akses. Alasan utama yang dijadikan untuk memusatkan kekuasaan biasanya mengenai persoalan geografis, faktor sejarah (waktu).
2. Konflik Kepentingan. Konflik kepentingan muncul karena adanya persaingan kepentingan baik itu yang dirasakan ataupun secara nyata

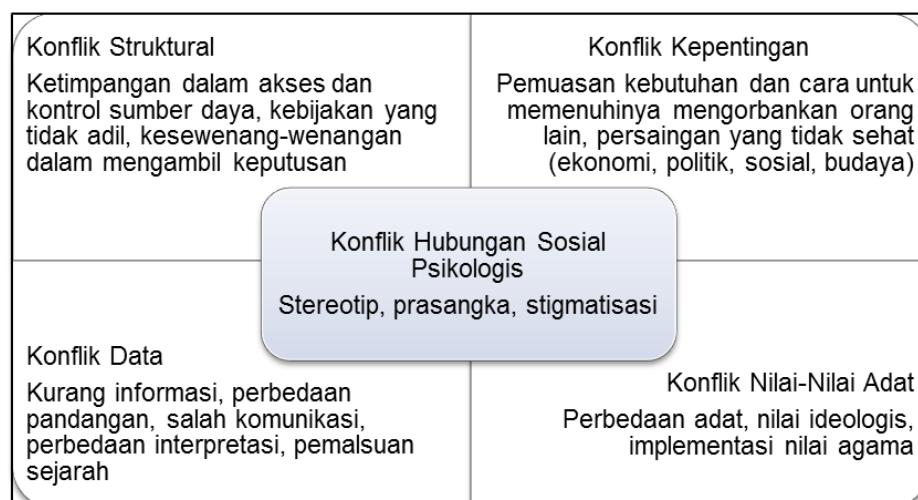
²¹ John Paul Lederach, *The Little Book...*, hlm 16.

²² Edwar Azar dalam Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 9.

²³ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hlm 13-16.

memang tidak bersesuaian. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan, pertama adalah masalah mendasar seperti ekonomi, sumber daya fisik, waktu, dan lain sebagainya. Kedua, masalah tata cara atau sikap dalam menangani suatu masalah. Ketiga, masalah psikologis seperti persepsi, kepercayaan, rasa hormat, keadilan, dan lain sebagainya.

3. Konflik Nilai. Adanya perbedaan nilai dimana akan terjadi konflik ketika orang berusaha memaksakan suatu sistem nilai kepada orang lain.
4. Konflik Hubungan Sosial Psikologis. Interaksi sosial antar pribadi ataupun antar kelompok yang terjadi di masyarakat menimbulkan persepsi, stereotip, dan prasangka. Persepsi negatif akan menimbulkan stereotip dan prasangka yang negatif pula. Prasangka yang ekstrem dapat menimbulkan kebencian yang berujung pada perilaku kekerasan.
5. Konflik Data. Konflik data terjadi ketika kekurangan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Memperoleh informasi yang salah, kesepakatan mengenai data apa saja yang relevan, menginterpretasikan data dengan cara yang berbeda. Namun konflik



data yang paling berbahaya adalah adanya manipulasi sejarah.

Gambar 2.2. Sumber Konflik di Indonesia

Sumber: Ichsan Malik, 2003.²⁴

Dari beberapa definisi konflik yang dikemukakan oleh para ahli maka peneliti menyimpulkan bahwa konflik adalah perbedaan yang berawal dari persepsi, kemudian mempengaruhi kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya atau sebuah perjuangan menundukkan pesaingnya dalam memperoleh hal-hal langka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Teori konflik digunakan peneliti untuk menganalisis kondisi relasional antara Pokdarwis di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik.

2.1.3. Teori Damai

Galtung mengusulkan perbedaan penting antara *positive peace* (perdamaian positif) dan *negative peace* (perdamaian negatif). *Positive peace* menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran, dan masyarakat yang diinginkan, keadilan seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *negative peace* adalah secara historis melambangkan tidak adanya perang dan konflik kekerasan lainnya yang berskala besar.²⁵ Di dalam sumber lain, peneliti menemukan bahwa *positive peace* menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran dan masyarakat yang diinginkan seperti harmoni keadilan. Sedangkan yang dimaksudkan *negative peace* oleh Galtung adalah ketika dalam suatu budaya, masyarakat, ataupun negara secara fenomenologis tidak terjadi perang ataupun kekerasan yang berupa benturan fisik ataupun lainnya tetapi didalamnya masih terdapat ketidakadilan, ketidaksetaraan, ketidakpuasan dan perselisihan pribadi. Oleh karena itu dalam keadaan *negative peace* perlu sebuah struktur yang harus menghilangkan setiap benih konflik baru, baik itu struktur pemerintahan maupun relasi sosial masyarakat.²⁶

²⁴ Dalam Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian...*, hlm 14.

²⁵ Webel dalam Charles Webel dan Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York: Routledge, 2007), hlm 6.

²⁶ Johan Galtung, *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*, Artikel dalam <https://www.galtung-institut.de/wp->

Berdasarkan teori damai menurut Galtung yang sudah disebutkan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa indikator *positive peace* adalah:

1. Adanya keadilan
2. Adanya kesetaraan
3. Adanya kepuasan
4. Tidak adanya perselisihan pribadi

Dalam penelitian ini, teori damai digunakan untuk menganalisis untuk menganalisis kondisi relasional antara Pokdarwis di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik.

2.1.4. Teori Manajemen Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang sangat berperan dalam kontribusi terhadap pendapatan baik itu secara lokal, maupun nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata juga berdampak pada perkembangan bisnis lainnya seperti hotel atau penginapan, restoran atau kuliner, transportasi atau agen perjalanan.

The World Travel and Tourism Council (WTTC) menyatakan bahwa pariwisata tumbuh sangat pesat dibanding dengan sektor perekonomian lainnya dan akan terus berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pangsa pasar di negara berkembang meningkat dari 30% pada tahun 1980 menjadi 45% di tahun 2013, dan diperkirakan akan mencapai 57% pada tahun 2030 yang setara dengan lebih dari 1 miliar kedatangan wisatawan internasional.²⁷

Perkembangan di sektor pariwisata harus diimbangi dengan manajemen dan pengelolaan pariwisata yang baik. Manajemen adalah

content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf diunduh pada 5 Agustus 2018.

²⁷ UNWTO 2014 dalam Edriana Pangastuti, "Analisis Daya Saing Dengan Menggunakan Destination Competitiveness Model (Studi Pada Heritage Tourism di Jawa), *e-Journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Volume 11, Nomor 1, 2017, hlm 2, dalam <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/675>., diunduh pada 6 Agustus 2018.

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan atau mengelola suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.²⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan organisasi tetapi bagaimana orang-orang atau kelompok yang menjalankan organisasi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan sumber daya. Terdapat lima tugas dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, *leading*, dan *controlling*.³⁰

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.³¹ Sedangkan kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.³²

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pariwisata adalah segala kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Teori manajemen pariwisata digunakan peneliti untuk menganalisis dan

²⁸ Hasibuan dalam Ni Luh Made Suryani dkk, "Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA)(Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung", Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm 2, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/23543>., diunduh pada 6 Agustus 2018.

²⁹ Shafritz dan Russel dalam Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Admisitrasi Publik. Konsep, Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 92.

³⁰ Donovan dan Jackson dalam Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Admisitrasi Publik...*, hlm 107.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 1, ayat (2).

³² *Ibid*, Pasal 1, ayat (3).

memahami terkait dengan pengelolaan pariwisata di objek wisata Goa Pindul.

2.1.5. Konsep Transformasi Konflik

Transformasi konflik merupakan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Transformasi konflik melihat konflik secara utuh, bukan sekedar melihat konflik yang ada di permukaan tetapi juga melihat akar-akar penyebab konflik yang dapat menciptakan konflik berkelanjutan. Adapun tujuan utama dalam transformasi konflik adalah membangun perubahan energi yang diciptakan oleh konflik dari yang bersifat destruktif menjadi konstruktif dan menghilangkan penyebab dasar terjadi konflik. Transformasi konflik ini berbicara tentang bagaimana mentransformasikan potensi kekerasan baru melalui pendekatan membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

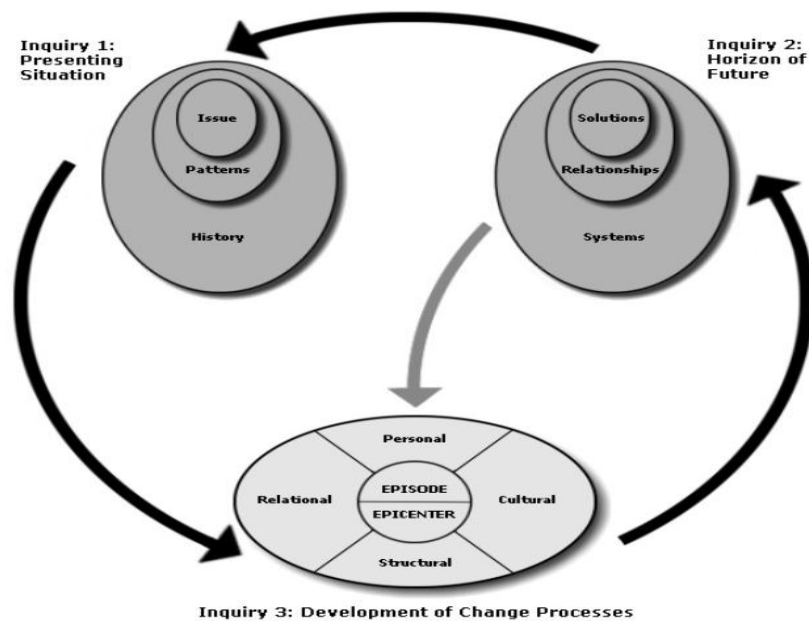
Transformasi konflik seringkali dilakukan pada hubungan sosial yang tidak adil sehingga perlu adanya transformasi untuk meningkatkan keadilan. Untuk meningkatkan keadilan, yang harus dipastikan adalah orang memiliki akses politik dan menyuarakan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Transformasi konflik mengutamakan kualitas hubungan baik itu sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Daripada berkonsentrasi secara eksklusif pada konten dan substansi dari perselisihan, pendekatan transformasi lebih memandang bahwa kunci untuk memahami konflik dan mengembangkan proses perubahan kreatif terletak pada aspek hubungan yang kurang terlihat. Oleh karena itu, isu-isu orang berkelahi menjadi sangat penting karena hubungan mewakili jaringan koneksi yang membentuk konteks konflik lebih luas.³³

Istilah transformasi konflik digunakan oleh John Paul Lederach pada tahun 1980an setelah pengalaman intensifnya di Amerika tengah. Dalam bukunya *The Little Book of Conflict Transformation*, ia memvisualisasikan gambaran besar dari transformasi konflik yang terdiri

³³ Lederach dalam Michelle Maiese, "Conflict Transformation", artikel dalam <https://www.beyondintractability.org/essay/transformation> diakses pada 4 Agustus 2018.

dari tiga komponen utama. Masing-masing komponen mewakili titik pengembangan strategi dan respon terhadap konflik. Gambaran besar itulah yang menjadi sebuah konsep transformasi konflik dalam penelitian ini.



Gambar 2.3. Gambaran Umum Transformasi Konflik³⁴

Dari gambar di atas memberikan gambaran tentang upaya transformasi konflik terdiri dari tiga tahapan penyelidikan. Penyelidikan pertama dilakukan untuk dapat mempresentasikan situasi yang terjadi. Penyelidikan kedua dilakukan untuk dapat memberikan gambaran masa depan terkait dengan upaya-upaya yang akan di tempuh. Penyelidikan ketiga dilakukan untuk dapat mengembangkan proses perubahan. Proses perubahan yang perlu dikembangkan adalah perubahan dari dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural dan dimensi budaya.

1. Dimensi personal

Dimensi pribadi mengacu pada perubahan yang dipengaruhi dan diinginkan untuk individu. Manusia sebagai individu dipengaruhi oleh konflik baik secara negatif maupun positif. Konflik memengaruhi aspek kognitif, emosional, persepsi, dan spiritual yang diperoleh dari

³⁴ John Paul Lederach, *The Little Book Of Conflict Transformation*, (New York: Good Books, 2003), hlm 35.

pengalaman manusia selama konflik berlangsung. Transformasi untuk meminimalkan dampak destruktif dari konflik dan memaksimalkan potensi pertumbuhan dalam diri seseorang sebagai manusia individu pada tingkat fisik, emosional, dan spiritual.³⁵

2. Dimensi relasional

Dimensi relasional menggambarkan adanya perubahan dalam hubungan tatap muka. Dalam hal ini keefektifan hubungan, kekuasaan, saling ketergantungan, aspek konflik yang ekspresif, komunikatif, dan interaktif perlu dipertimbangkan. Transformasi mengacu pada bagaimana pola komunikasi dan interaksi dalam suatu hubungan dipengaruhi oleh konflik. Perubahan mendasar mengenai pola bagaimana orang memandang, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kejar, bagaimana mereka menyusun hubungan secara interpersonal, dan antar kelompok.³⁶

3. Dimensi struktural

Dimensi struktural menyoroti penyebab dasar terjadinya konflik dan perubahan yang ditimbulkan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Aspek ini menekankan cara-cara dimana struktur sosial, organisasi, lembaga, dan institusi yang dibangun dan dipertahankan dapat berubah karena adanya konflik. Dalam dimensi struktural mengacu pada cara membangun dan mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, menyediakan akses ke sumber daya, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kelompok, komunitas, dan seluruh masyarakat.³⁷

4. Dimensi budaya

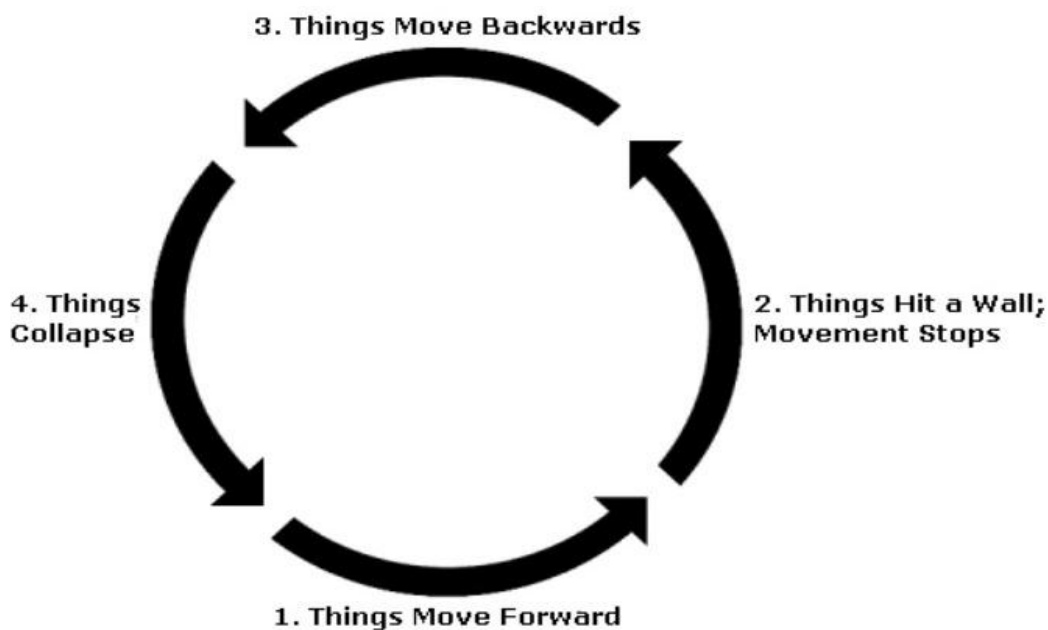
Dimensi budaya mengacu pada bagaimana konflik dapat mengubah pola kehidupan kelompok dan cara-cara budaya mempengaruhi proses perkembangan dalam menangani dan menanggapi

³⁵ John Paul Lederach, *The Little Book...*, hlm 23.

³⁶ *Ibid*, hlm 24.

³⁷ *Ibid*, hlm 24.

konflik. Dalam dimensi budaya, secara preskriptif transformasi berusaha membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami pola budaya yang berkontribusi terhadap konflik, kemudian mengidentifikasi, mempromosikan, membangun sumber daya budaya yang ada dan mekanisme untuk menanggapi dan menangani konflik secara konstruktif.³⁸



Gambar 2.4. Lingkaran Perubahan³⁹

Konsep transformasi yang sudah disebutkan di atas dijadikan pedoman atau landasan peneliti untuk memahami upaya transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di objek wisata Goa Pindul.

2.1.6. Konsep Keamanan Daerah

Stabilitas suasana tenang dan damai adalah faktor penting dalam mencapai target kerja, oleh karena itu keamanan nasional dan daerah perlu di jaga untuk dapat mewujudkan tujuan nasional negara Republik Indonesia.

Wolfers (1962) dalam Nugroho berpendapat bahwa keamanan, dalam arti obyektif apa pun, mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dalam arti subyektif, tidak adanya ancaman

³⁸ John Paul Lederach, *The Little Book...*, hlm 25.

³⁹ *Ibid*, hlm 42.

terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan, nilai-nilai seperti itu akan diserang.⁴⁰

Keamanan dan ketidakamanan didefinisikan sebagai kerentanan terhadap suatu hubungan baik internal maupun eksternal yang mengancam atau berpotensi menjatuhkan atau melemahkan struktur negara dan rezim-rezim pemerintahan baik secara teritorial maupun institusional.⁴¹

Daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Daerah sendiri terdiri atas provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kabupaten yang dipimpin oleh bupati, dan kota yang dipimpin oleh walikota.

Suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan aman apabila wilayah tersebut aman dari serangan, bahaya, atau kerusakan. Rasa aman dan percaya diri atau situasi dimana manusia dapat merasa aman dan percaya diri. Keamanan atau perlindungan atas rahasia negara dan warganya.⁴³

Keamanan daerah merupakan keamanan dalam negeri, sedangkan definisi dari keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴ Lebih lanjut, pengertian dari keamanan

⁴⁰ Riant Nugroho, *National Security Policy Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 13.

⁴¹ Riant Nugroho, *National Security...*, hlm 13.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (3).

⁴³ Dalam <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/security> diakses pada 20 Agustus 2018.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (6).

dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴⁵

Dari beberapa pengertian di atas maka keamanan daerah merupakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan daerah adalah sebuah keniscayaan yang harus di jaga sehingga iklim investasi dan perjalanan roda pembangunan daerah tetap berjalan. Kepala desa, camat, dan seluruh komponen di desa wajib menjaga keutuhan sistem agar tidak mudah muncul konflik. Keamanan daerah sangat penting karena struktur keamanan di daerah menentukan proses keamanan nasional.

Konsep keamanan daerah digunakan peneliti untuk menganalisis konsep keamanan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan sebagai perbandingan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Meriwijaya dalam Tesisnya yang berjudul *“Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016”*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di objek wisata Goa Pindul disebabkan karena adanya struktur ekonomi yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, adanya perbedaan persepsi mengenai

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (5).

kepemilikan tanah dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul, strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut adalah *win-win strategy* dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi konflik.⁴⁶ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan objek yang di teliti yaitu tentang resolusi konflik Goa Pindul. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Meriwijaya lebih fokus meneliti konflik dan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sedangkan fokus peneliti adalah meneliti resolusi konflik di objek wisata Goa Pindul pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 dan hambatan-hambatan dalam resolusi konflik objek wisata Goa Pindul.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Nurohman dalam Jurnal Civics dengan judul "*Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)*". Hasil penelitian tersebut adalah pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul dengan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang untuk mengelola obyek wisata Goa Pindul, memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha pariwisata untuk mengelola usahanya dengan memenuhi persyaratan administratif atau melalui kerjasama. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian konflik Goa Pindul adalah tidak adanya payung hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan sehingga terbatasnya ruang gerak pemerintah

⁴⁶ Meriwijaya, *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*", Tesis Magister, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

untuk bertindak karena terlambatnya pemerintah daerah dalam mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengakibatkan konflik berlarut-larut dan sulitnya para pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan.⁴⁷

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Laode Machdani Afala dalam Jurnal of Governance dengan judul “*Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul*”. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa dinamika konflik yang terjadi dalam perjalanan Goa Pindul telah meningkatkan eskalasi konflik seiring dengan berkembangnya pariwisata Goa Pindul yang semakin terkenal dan mendatangkan keuntungan yang besar. Hal tersebut disebabkan karena hubungan antara aktor yang berkonflik yaitu pemerintah, Pokdarwis, dan komunitas lokal dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.⁴⁸

Adapun keterbaruan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada resolusi konflik dan dinamika konflik yang terjadi di objek wisata Goa pindul sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti proses atau upaya transformasi konflik pasca penyelesaian konflik guna menjaga stabilitas keamanan daerah.

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Pengarang	Teori/Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Meriwijaya. 2016. <i>Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis</i>	Menggunakan pendekatan deskriptif	Objek penelitiannya di Goa Pindul.	Fokus penelitiannya pada resolusi

⁴⁷ Habib Nurohman, “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata)”, *Jurnal Civics*, 2017, hlm 1, dalam <http://eprints.uny.ac.id/53202/6/JURNAL%20HABIB%2010401244031.pdf>., diunduh pada 26 Juni 2018.

⁴⁸ Laode Machdani Afala, “Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul”, *Journal of Governance*, Volume 2, Nomor 1, 2017 dalam https://www.academia.edu/35424201/Menalar_Dinamika_Konflik_Wisata_Goa_Pindul., diunduh pada 27 Mei 2018.

	<p><i>Masyarakat. Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.</i> (Tesis). Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p>	<p>kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik, teori konflik agraria, dan teori resolusi konflik.</p>		<p>konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, sedangkan peneliti berfokus pada transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di objek wisata Goa Pindul.</p>
2.	<p>Habib Nurohman. 2017. <i>Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)</i>. Jurnal Civics, September 2017.</p>	<p>Merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Objek penelitiannya di Goa Pindul.</p>	<p>Fokus penelitiannya pada penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul, sedangkan peneliti berfokus pada transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di objek wisata Goa Pindul.</p>

3.	<p>Laode Machdani Afala. 2017. <i>Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul</i>. Journal of Governance, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.</p>	-	<p>Objek penelitiannya di Goa Pindul.</p>	<p>Fokus penelitiannya pada dinamika konflik wisata goa pindul, sedangkan peneliti berfokus pada transformasi konflik pasca penyelesaian konflik di objek wisata Goa Pindul.</p>
----	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

